

KEEFEKTIFAN PROGRAM PELATIHAN WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT (WKSBM) DI BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) YOGYAKARTA

EFFECTIVENESS OF THE COMMUNITY BASED SOCIAL WELFARE PROGRAM (WKSBM) IN THE LARGE CENTER OF EDUCATION AND TRAINING OF SOCIAL WELFARE (BBPPKS) YOGYAKARTA

Oleh: Fauzan Alghifari, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, FIP, UNY
alghifarif@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) keterlaksanaan program pelatihan WKSBM di Yogyakarta, (2) mengevaluasi tingkat keefektifan standard dan kinerja penyelenggaraan program pelatihan WKSBM di Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan model evaluasi discrepancy. Penelitian ini bertempat di Yogyakarta dan dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2019. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan angket. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan oleh Miles & Huberman (1992:16). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) program pelatihan WKSBM telah berhasil diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahap definisi dan tujuan diselenggarakannya pelatihan, (2) program pelatihan WKSBM dinilai sangat layak dan penting untuk dikembangkan lebih serius lagi dengan mempertimbangkan beberapa rekomendasi dalam definisi program, instalasi program, proses, outcome, dan analisis biaya manfaat.

Kata Kunci: *program pelatihan, WKSBM, discrepancy evaluation model*

Abstract

This study aims to determine: (1) the execution of the WKSBM training program in Yogyakarta, (2) evaluating the level of achievement of the standards and performance of the implementation of the WKSBM training program in Yogyakarta. The approach used in this study is a qualitative descriptive approach to discrepancy evaluation model. This research was located in Yogyakarta and was carried out in August-September 2019. Data collection techniques involve observation, interviews, and questionnaires. While the data analysis is done using, data reduction, data presentation and conclusions by Miles & Huberman (1992: 16). The results of this study indicate that: 1) the WKSBM training program has been successfully implemented properly in accordance with the definition and purpose of the training, 2) the WKSBM training program is considered to be very feasible and it is important to develop it more seriously by considering several recommendations in the program definition, program installation, process, outcome, and cost benefit analysis.

Keywords: training programs, WKSBM, discrepancy evaluation model.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir dari kebijakan manusia dalam berpikir. Pemberdayaan adalah suatu usaha, proses atau fase yang dimaknai sebagai kegiatan sosial yang diselenggarakan di lingkungan masyarakat dengan kebutuhan tertentu. Maka dari itu, hal pertama yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan program pemberdayaan adalah melihat tingkat kebutuhan masyarakat serta mencari tahu sumber daya apa saja yang bisa dimaksimalkan dalam memenuhi kebutuhan itu. Sedangkan jika merujuk pada pendapat para ahli seperti yang diungkapkan oleh Suhendra (2006: 74-75), menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan dari semua potensi.

Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang langsung dapat diimplementasikan adalah pelatihan. Pelatihan yang berasal dari pemerintah biasanya memiliki upaya strategis untuk memberdayakan masyarakat penyandang masalah sosial adalah melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan keaktifan dari para pesertanya. Pelatihan merupakan bentuk implementasi program pemberdayaan

masyarakat yang paling dapat dirasakan langsung manfaatnya.

Di dalam pelatihan, selalu ada proses belajar yang mengandung makna mendalam. Masyarakat diharapkan mampu mengalami suatu proses mental yang bersifat personal, berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan untuk menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Winkel, 1991). Dalam definisi tersebut, pelatihan yang dimuat dalam program wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat atau sering dikenal WKSBM inilah yang diharapkan memiliki peranan besar dalam membangun kesejahteraan sosial untuk masyarakat sekitar.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi di era digital ini, menuntut masyarakat untuk lebih responsif dalam menyikapi perubahan. Tantangan baru menjadi motivasi untuk melangkah maju. Sehingga, sangat penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan upgrade diri. Potensi terbesar pada masyarakat adalah semangat “gotong royong”. Sehingga, harapannya pemerintah melalui pihak kementerian bersinergi untuk memanfaatkan potensi masyarakat ini sebagai acuan dalam pembuatan program pemberdayaan.

Sumber daya manusia adalah aset utama yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan kesejahteraan bangsa. Pengelolaan SDM yang baik, di tambah dengan dukungan dari pihak pemerintah akan membantu masyarakat memenuhi tantangan baru yang akan di hadapi di masa depan. Maka dari itu, pelatihan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan profesional adalah kunci dalam pembentukan sumber daya manusia yang siap bersaing di dunia global. Pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas kehidupan masyarakat. Sehingga, setiap pelatihan akan melahirkan jiwa-jiwa baru, inovasi baru, dan semangat baru menuju perubahan. Pelatihan yang diberikan harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat, dan bermanfaat lebih lanjut dalam pengembangan potensi diri menuju tingkatan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Seperti yang dilansir dari website Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (dinsos.jogjaprov.go.id), yang diakses pada tanggal 24 Juni 2019), tentang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi. Konsep ini diberi nama catur pilar. Artinya, ada empat tiang yang menopang keberhasilan proyek ini. Maka pemerintah saja tidak cukup. Perlu partisipasi

dari pihak swasta (perusahaan melalui CSR), perguruan tinggi, dan masyarakat itu sendiri. WKSBM akan menjadi program yang sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat, jika penyelenggaraannya tepat dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 42/HUK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). WKSBM adalah sistem kerja sama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput / masyarakat dalam bentuk, usaha kelompok, Lembaga maupun jaringan pendukungnya (misalnya: Kelompok Usaha Ekonomis Produktif, Kelompok Pengajian, Gabungan Kelompok Tani, RT, RW, Dasa Wisma dan lain-lain), baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Masyarakat yang menjadi sasaran dari program WKSBM belum paham secara penuh tujuan dari diselenggarakannya program tersebut. Begitu pun pada saat program pelatihan dilaksanakan, ternyata masih banyak ditemukan narasumber yang

tidak menguasai materi seperti yang diharapkan. Ditambah dengan hal-hal teknis seperti publikasi, penyaluran informasi, dan komunikasi yang kurang dari pihak penyelenggara kepada pihak penerima bantuan. Kesenjangan-kesenjangan tersebut mengakibatkan program tidak dapat ditindaklanjuti dengan baik. Dampak yang lebih jauh lagi adalah, dana penyaluran WKSBM akhirnya hanya dana pasif yang terbuang percuma karena pelatihan yang diselenggarakan hanya berhenti pada ranah formal, jauh dari ranah implementatif.

Upaya penanganan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas menyentuh aspek fisik. Hal itu membuat masyarakat mengalami ketergantungan terhadap uluran bantuan dari pemerintah. Apalagi jika program pemberian dana bantuan dan pembangunan infrastruktur tidak dibersamai dengan pengembangan diri dan pemberdayaan sumber daya manusia dengan baik, maka kegiatannya pun akan sia-sia.

WKSBM diharapkan tumbuh melalui proses alamiah yang disengaja. Sehingga, kebijakan pengembangan WKSBM ini berada pada posisi yang sangat terbatas baik dari segi pendanaan maupun jangkauan pelayanan. Bagaimana pun pemerintah sedang berusaha memperbaiki sumber daya masyarakat Indonesia. Agar tujuan tersebut

dapat terwujud, perlu adanya antisipasi timbulnya cacat pada program unggulan dengan mengerjakan suatu kegiatan evaluasi untuk menemukan kesenjangan dan capaian-capaian yang telah dihasilkan, sehingga memungkinkan untuk melakukan suatu perbaikan dan pemrograman ulang.

Tugas-tugas penyelenggara pelatihan dalam mengawal program hingga memenuhi tingkat ketercapaian seperti yang telah dirumuskan perlu mendapatkan pengawalan berkala. Pengawalan itu dapat berupa penilaian dan kegiatan evaluasi berkelanjutan yang dirancang sebagai *watchdog of program implementation*. Selanjutnya, evaluasi program WKSBM dapat digunakan untuk menyetujui standar dalam program yang dirumuskan, menentukan apakah ada kesenjangan antara kinerja dengan standar perumusan program yang telah ditetapkan, dan menggunakan informasi tentang kesenjangan tersebut untuk meningkatkan kinerja program atau mengakhiri program jika ternyata angka ketercapaiannya rendah dan menggantinya dengan program baru yang lebih memiliki kinerja yang baik.

Selain itu yang menjadi perhatian peneliti adalah, pelaksanaan WKSBM dilakukan tanpa ada kegiatan supervisi atau pendampingan yang dilakukan oleh petugas serta panitia WKSBM pada saat program

diimplementasikan. Ada pun kegiatan tindak lanjut yang dilakukan, kurang mendapatkan perhatian yang serius sehingga terkesan hanya formalitas kegiatan. Penyebaran informasi, publikasi dan komunikasi antar pihak penyelenggara dengan masyarakat lokal pun kurang terjalin dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada pelaksanaan WKSBM pada tahun 2018 di Yogyakarta.

Pemateri dan narasumber dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh WKSBM kurang sesuai dengan perencanaan, karena hanya dicatut dari mahasiswa-mahasiswa magang yang masih belum paham betul bagaimana program WKSBM dapat dioperasikan. Ditambah, durasi waktu pelatihan yang amat singkat, membuat internalisasi nilai-nilai WKSBM dan pembekalan materi WKSBM pada saat pelatihan kurang mendapatkan hasil yang memuaskan. Adanya kesenjangan antara hasil *need assessment* dengan program pelatihan yang dilakukan membuat WKSBM perlu mendapatkan evaluasi secara berkelanjutan melalui model evaluasi *discrepancy*. Model evaluasi ini akan memberikan penilaian pada tiap tahapan berdasarkan kinerja dan standar yang ditetapkan.

Pelatihan sendiri memiliki rangkaian yang kompleks dan membutuhkan strategi khusus dalam mengimplementasikannya. Termasuk dalam kegiatan awal seperti training *need assessment* yang merupakan langkah awal sebelum program pelatihan dilakukan. Selanjutnya, tahap instalasi dan implementasi memerlukan sebuah penilaian untuk mengetahui ketercapaian dan kesenjangan yang ditemukan pada saat pelatihan diselenggarakan.

Pelatihan yang berhasil adalah pelatihan yang memandang bahwa aktivitas dalam pelatihan tersebut “comfortable” (Macintosh, 1993) dan “aplikatif”. Sedangkan pelatihan yang gagal, biasanya karena diabaikannya perencanaan rancangan ketika menentukan pelatihan (Retno Wulandari, 2005). Freeman (1993) menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia harus diintegrasikan dengan perencanaan strategis. Maka dari itu, sebuah pelatihan harus dapat menganalisis sumber daya manusia dan apa yang benar-benar mereka butuhkan saat ini dan di masa yang akan datang untuk mencapai tugas perkembangan dan tujuan sebuah organisasi. Selanjutnya, hasil dari pelaksanaan pelatihan lah yang akan berbicara lebih banyak. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian menggunakan model evaluasi

discrepancy untuk melihat kesenjangan yang terjadi antara tujuan program WKSBM dengan penyelenggaraan program WKSBM di Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan jenis penelitian deskripsi dan menggunakan pendekatan kualitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2018 s/d September 2019. Penelitian dilakukan kurang lebih selama 14 bulan. Bertempat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah program pelatihan WKSBM di Yogyakarta. Sedangkan objek penelitian adalah panitia penyelenggara dan peserta kegiatan pelatihan WKSBM di Yogyakarta

Prosedur

Prosedur dalam penelitian ini dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Data tersebut dideskripsikan, kemudian dikategorikan berdasarkan kesamaan, perbedaan, dan yang spesifik dari sumber, menggunakan model

evaluasi DEM. Dan selanjutnya data yang dianalisis akan menghasilkan kesimpulan.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan catatan anekdot.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Miles, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan (Sugiyono, 2007: 337).

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan tentative, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menyajikan data tentang Evaluasi program pelatihan WKSBM di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Lokasi penelitian bertempat di Kiringan Kidul, Bulu Rejo, Semin Gunung Kidul DIY.

Kesenjangan dalam Pelaksanaan Program Pelatihan WKSBM

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang kemudian diolah menggunakan model evaluasi discrepancy yang dicetuskan oleh Provus (1971). Provus (1971) memandang evaluasi sebagai proses menyetujui standar. Artinya dalam penelitian ini, peneliti sebagai evaluator sudah dilibatkan sejak awal dalam proses menyetujui standar. Hal-hal yang menjadi

tujuan pelatihan, kebutuhan pelatihan, sasaran, dan yang berkaitan dengan teknis pelatihan telah terlebih dahulu disusun sedemikian rupa.

Selanjutnya, peneliti sebagai evaluator bertindak dalam mencari kesenjangan antara kinerja penyelenggara dalam beberapa aspek dalam program pelatihan dan standar yang telah ditetapkan. Terakhir, peneliti menggunakan informasi yang berupa kesenjangan antara standar dengan kinerja untuk merekomendasikan keputusan yang mungkin akan dilaksanakan sebagai akibat dari diselenggarakannya program pelatihan.

1. Tahap Definisi

Perumusan definisi program pelatihan dilakukan untuk mendesain dan memproses pekerjaan evaluasi. Pada tahap ini, standar digunakan sebagai acuan dalam memenuhi setiap harapan. Hal ini akan berguna untuk melihat sejauh mana program pelatihan WKSBM dapat memenuhi keefektifan dari standar awal yang dirumuskan.

Perumusan standar dalam program pelatihan WKSBM ini mengikuti visi dari pemerintah pusat. Lalu diterjemahkan dalam bahasa pemrograman yang lebih teknis. Dalam tahap ini, evaluator bekerja untuk melihat set desain yang lengkap, spesifikasi

program dan kriteria yang ditentukan oleh penyelenggara atau pemilik kebijakan secara struktural. Program pelatihan WKSBM pada hakikatnya memiliki tujuan jangka panjang yang dapat mengantarkan masyarakat pada gerbang kesuksesan bersama-sama.

2. Tahap Instalasi

Dalam tahap ini, desain atau definisi dari program yang digunakan sebagai standar untuk menilai kegiatan dalam pelatihan mulai diperasionalkan. Evaluator melakukan serangkaian penilaian tes kesesuaian untuk mengidentifikasi perbedaan antara standar/tujuan dengan implementasi aktual dari program pelatihan. Tujuan dari kegiatan dalam tahap ini adalah untuk memastikan bahwa program telah diinstal sebagaimana pada tahap perancangannya. Evaluator bekerja bersama koordinator program yaitu Bp. Prih Wardoyo untuk mempersiapkan pengimplementasian program pelatihan. Koordinator program percaya bahwa individu yang terlibat dalam kegiatan akan sangat bervariasi. Termasuk dalam menerima informasi dan menjalankan deskripsi kerja seperti yang telah direncanakan. Hal itu karena masing-masing individu memiliki kebiasaan dan kepribadian yang berbeda.

3. Tahapan Proses

Sejauh mana visi, tujuan dan standar program pelatihan WKSBM diterapkan,

beserta kesesuaiannya dengan pelaksanaan. Pengamatan langsung oleh evaluator menjadi kunci dalam penilaian. Jika ada beberapa perbedaan, atau kesenjangan, peneliti kemudian mengusulkan beberapa solusi untuk dipertimbangkan.

Jika kesenjangan itu masih bisa ditolerir, maka evaluator bersama dengan penyelenggara pelatihan dapat mengubah definisi program agar sesuai dengan implementasi programnya. Jika ternyata terdapat lebih banyak kesenjangan, evaluator dengan penyelenggara pelatihan dapat membuat penyesuaian pada saat program dijalankan.

4. Tahap Produk (Output)

Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan tujuan jangka pendek untuk program yang dilaksanakan. Provus membagi tujuan menjadi tiga bagian berdasarkan hasil. Bagian yang pertama berupa hasil langsung, bagian kedua adalah keefektifan tujuan jangka pendek, dan bagian yang ketiga hasil jangka panjang atau tujuan akhir sebuah program pelatihan.

Dalam tahap produk ini, pengumpulan data dan sebuah analisis kritis menjadi bagian terpenting dalam proses evaluasi. Analisa kritis akan membantu penyelenggara menentukan tingkat capaian program di periode selanjutnya serta

memperbaiki kesenjangan yang muncul dalam upaya pengimplementasian program.

5. Analisis Biaya Manfaat

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial melalui WKSBM, terdapat strategi dan standar keefektifan yang telah dirumuskan oleh pihak penyelenggara pelatihan. Strategi pertama, sumber kemitraan WKSBM adalah masyarakat yang telah diidentifikasi kebutuhannya melalui kegiatan TNA. Kedua, penyusunan dan perumusan gagasan atau program kegiatan harus disesuaikan dengan hasil analisis melalui TNA. Ketiga, Panitia memiliki kewajiban untuk memfasilitasi dan menginventarisasi pihak-pihak yang potensial dan memiliki sumber daya serta dana yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Keempat, WKSBM terwujud melalui sistem sosial yang alamiah dengan menggambarkan rincian tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam satu garis koordinasi. Terakhir, rumusan program kegiatan lanjutan merupakan produk yang disepakati bersama dalam rapat kolaboratif antara pengurus dan anggota/sasaran.

Program Pelatihan WKSBM

WKSBM memiliki unsur-unsur berupa keperangkatan pelayanan sosial oleh masyarakat yang terbentuk dari penguatan jejaring sosial. Dengan didukung oleh kearifan lokal dan sistem nilai sosial yang ada

di masyarakat setempat, WKSBM hadir untuk memberikan manfaat yang besar. Dalam tahap penyusunan serta pemantapan, dan pengembangan konsepsi WKSBM di tengah masyarakat, penyelenggara telah mampu mencapai titik-titik kesadaran kolektif sehingga muncul rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap anggota/peserta WKSBM satu sama lain.

Standar performa penyelenggara pelatihan juga perlu ditentukan agar tercapai kesesuaian antara tujuan penelitian dengan teknis pelaksanaan pelatihan. Penyelenggara adalah yang paling bertanggung jawab dalam keefektifan tujuan dari dilaksanakannya program pelatihan. Sehingga kualitas pribadi dan komitmen diri perlu dibentuk sedemikian rupa. Bahkan jika perlu, pihak penyelenggara melakukan pembekalan kepada panitia penyelenggara dan pendamping yang akan terlibat dalam kegiatan pelatihan WKSBM.

Tujuan Program Pelatihan WKSBM

Program pelatihan WKSBM memiliki tujuan mengembangkan keahlian peserta pelatihan. Untuk bisa mencapai tujuan, penyelenggara mempertimbangkan sumber daya masyarakat setempat yang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat dari masing-masing peserta. Setiap orang memiliki kemampuan dan preferensi yang berbeda-beda. Maka, penyelenggara sudah

harus mampu dan paham betul bahwa fokus pengembangannya bukan hanya pada pengentasan kemiskinan akan tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada pelatihan yang telah dilakukan oleh penyelenggara WKSBM, mulai muncul adanya jaringan kerja baik di lingkungan masyarakat setempat maupun lingkungan sosial yang lebih luas lagi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka presentasi keefektifan program pelatihan dari 22 peserta yang mengikuti pelatihan, yaitu sebesar 94%.

Standar Penyelenggaraan Program Pelatihan WKSBM

WKSBM memiliki unsur-unsur berupa keperangkatan pelayanan sosial (KPS) yang oleh masyarakat lebih dikenal dengan keperangkatan pelayanan sosial. Terbentuknya jaringan sosial dalam KPS menjadi pilar dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial. Berkenaan dengan hal itu, maka dalam penyelenggara WKSBM menentukan standar dalam penerapan dimensi kelembagaan dan system nilai serta jaringan sosial.

Dalam dimensi sistem nilai, program WKSBM sangat diharapkan untuk mampu mengembangkan nilai sosial budaya yang dikenal dengan nama Mapalus. Mapalus ini mendasari tumbuhnya berbagai kelompok atau rukun, baik rukun yang berbasis

lingkungan, keagamaan dan kelompok independen. Program WKSBM diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai lokal, anti kekerasan, toleransi, saling peduli satu sama lain dan kerja sama yang kuat di kalangan masyarakat. Pada tahap standar penyelenggaraan, pemilihan lokasi harus didasarkan pada kebutuhan dari masing-masing daerah. Sebelum kegiatan dimulai, penyelenggara perlu lebih dulu membentuk sebuah jaringan yang kuat di kalangan masyarakat. Jaringan ini akan memiliki fungsi sebagai penggerak dan membentuk suatu fungsi kolaborasi dalam kegiatan WKSBM. Pendekatan budaya diperlukan untuk mencapai kesepahaman tujuan bersama antara penyelenggara dengan pihak masyarakat setempat.

Kesenjangan dalam Program Pelatihan WKSBM

Program Pelatihan WKSBM telah menjadi program unggulan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun peneliti menemukan beberapa hal yang penting untuk dibahas lebih lanjut agar dapat menjadi perhatian bagi penyelenggara pelatihan. Salah satunya dalam pelaksanaannya, pemerintah di tingkat desa perlu mengetahui potensi sumber daya manusia yang ada di daerahnya. Dengan demikian, bekal yang diberikan oleh

penyelenggara WKSBM dan semua yang terlibat di dalamnya akan dapat dieksekusi dengan hebat. Definisi program pelatihan WKSBM dirumuskan sedemikian rupa agar sejalan dengan program pemerintah pusat. Sedangkan kekhasan program pelatihan dan fokus pengembangannya menyesuaikan masing-masing daerah.

Perbandingan antara Standar dengan Kinerja dalam Penyelenggaraan Program Pelatihan WKSBM

Perbandingan antara standar dan kinerja terlihat dari segi keseluruhan, pelatihan dari program WKSBM telah berhasil dikembangkan dengan cukup baik. Program pengembangan yang menjadi tindak lanjut pelatihan WKSBM pun mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang diungkap pada awal TNA. Pada umumnya, pengembangan pengetahuan adalah pekerjaan rumah yang pertama kali harus diselesaikan. Penyelenggara berhasil menjawab itu dengan tepat.

Sumber pendanaan kegiatan WKSBM berasal dari masyarakat setempat, pemerintah dan swasta. Penggalangan dana yang dilakukan misalnya, gerakan peduli simbah, sedekah receh, sedekah barang bekas, bagi hasil usaha WKSBM, penggalangan dana dari pemudik, pengelolaan zakat, pengelolaan sedekan

pertanian, proposal pengajuan dana, dan kontak infaq pertemuan.

Hasil evaluasi kegiatan dari sudut pandang peserta pelatihan mengungkap bahwa pemateri dan fasilitator mampu membawa materi pelatihan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu pada kegiatan tindak lanjut, pendampingan, dan durasi pada saat pelatihan dilaksanakan. Sebesar 94% setuju bahwa penyelenggara telah sukses membawa program pelatihan hingga berhasil. Sedangkan dari segi penguatan materi, sebesar 91% peserta setuju narasumber mampu membawa materi dengan baik. Kemudian, dari segi fasilitas dalam penyelenggaraan pelatihan, sebesar 92% peserta setuju telah mendapatkan sambutan yang baik dan pemenuhan fasilitas yang baik.

SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Program pelatihan yang dilaksanakan oleh WKSBM berhasil diimplementasikan dengan baik sesuai dengan awal definisi dan penentuan standar dalam pelatihan. Internalisasi nilai dan penyadaran tentang wawasan WKSBM yang menjadi fokus utama pelatihan telah berhasil

mendapatkan ruang di dalam lingkungan masyarakat untuk tumbuh lebih baik lagi dari waktu ke waktu.

2. Program pelatihan WKSBM memiliki tujuan untuk menguatkan jaringan kerja sama antar kelompok lokal dalam usaha kesejahteraan sosial secara berkelanjutan; meningkatkan kepekaan, kepedulian dan kesetiakawanan sosial; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam usaha kesejahteraan masyarakat; mencegah dan tertanganinya masalah-masalah sosial di sekitar masyarakat; tujuan lain untuk terdayagunakannya potensi sumber daya setempat secara berkelanjutan.
3. WKSBM telah berhasil mengakomodasi desain sebuah program pelatihannya ke dalam kegiatan pembentukan jaringan kelompok usaha lokal dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat. Pembinaan dalam kegiatan ini adalah kunci keberhasilan program WKSBM yang diluncurkan. Pembina perlu melakukan supervisi dan bimbingan secara intens, terpadu, dan responsif. Terutama untuk merespon kesulitan yang dialami oleh masyarakat selama program berlangsung. Peningkatan kesejahteraan sosial memang belum memiliki angka yang signifikan. Akan tetapi, pada bagian ini, penyelenggara telah mengadakan

kolaborasi dengan berbagai pihak agar masyarakat dapat membuka mata lebih lebar lagi terhadap segala kesempatan yang ada padanya. Strategi yang dilakukan oleh penyelenggara dalam rangka mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam program WKSBM ini belum menimbulkan dampak yang efektif terhadap peningkatan lapangan usaha lokal. Perlu desain kegiatan bisnis yang lebih besar lagi agar dapat membuka peluang seperti ini.

4. Kesenjangan dalam program pelatihan WKSBM terjadi dalam penguatan jejaring kerja yang masih jauh dari harapan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan program, kurang maksimalnya program pendampingan peningkatan kesejahteraan sosial melalui kegiatan bisnis masyarakat setempat, teknis pelaksanaan yang masih jauh dari harapan, serta kegiatan-kegiatan pendukung yang perlu diselenggarakan sebelum pelatihan untuk memastikan kesiapan penyelenggara pelatihan dan peserta pelatihan.
5. Perbandingan antara Standar dengan Kinerja dalam Penyelenggaraan Program Pelatihan WKSBM dapat terlihat dengan cukup jelas, Penggunaan discrepancy evaluation model adalah sebagai salah satu strategi dalam usaha memperbaiki

keterlaksanaan program WKSBM melalui beberapa tahapan. Dari tahapan yang telah dilalui, dengan melihat adanya perbandingan dan kesenjangan yang terdapat dalam penyelenggaraan program pelatihan WKSBM, maka peneliti menyimpulkan bahwa program ini masih bisa dilanjutkan dengan menerapkan beberapa revisi sesuai dengan rekomendasi yang telah dipaparkan oleh peneliti dengan menggunakan tabel discrepancy.

Implikasi

Dari segi input/definisi, WKSBM telah mendapat dukungan penuh dari pendamping lokal dan petugas sosial setempat sehingga mendapatkan legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan yang lebih mendalam lagi di kemudian hari. Terlaksananya program pendampingan memiliki hasil dan pemahaman dari tujuan khusus WKSBM dan tercapainya tujuan pelatihan di kemudian hari. Penyuluh Sosial yang mendampingi langsung peserta pelatihan akan mengantarkan peserta pada kegiatan yang lebih besar lagi dan berorientasi pada pertumbuhan jaringan. Proses pendampingan dan tindak lanjut ini dilakukan secara terus menerus dan terorganisir sesuai dengan arahan narasumber dan standar keefektifan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

a) Bagi BBPPKS Yogyakarta,

Agar menjadikan WKSBM sebagai program unggulan. WKSBM dinilai dapat memperluas jangkauan layanannya agar daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus dapat tumbuh dengan pendampingan yang baik dari pemerintah setempat.

b) Bagi Peserta Pelatihan WKSBM,

Agar menjadikan program pelatihan WKSBM ini sebagai sumber pemberdayaan yang memandirikan. Para peserta perlu memberikan umpan balik aktif kepada penyelenggara agar program WKSBM dapat berjalan dengan lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Sedangkan untuk Fasilitator dan Penyelenggara, agar dipilih sesuai dengan potensi atau keahlian yang ada pada diri masing-masing peserta.

c) Bagi Panitia Penyelenggara

Agar lebih memperhatikan materi yang akan disampaikan pada saat kegiatan. Materi perlu disesuaikan dengan narasumber yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Materi dalam pelatihan perlu lebih mendalam lagi, sehingga durasi waktu akan menyesuaikan sesuai dengan ketersediaan peserta yang terlibat dalam pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

Bimbingan Kerjasama Dan Penguatan Kelembagaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). Diambil pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 22.00 WIB. <http://dinsos.jogjapro.go.id/?p=228>
2.

Macintosh, Stephen S., et al. (1993). *Adding Value Through Training. Training and Development*. July, hlm. 39-44.

Miles B. Matthew B., & Huberman, Michael. (1992). *Analisa Data Kualitatif (Alih bahasa: Tjetjep Rohendi Rohidi)*. Jakarta: UI Press.

Provus, Malcolm M. (1971). *Discrepancy Evaluation for Educational Program Improvement and Assessment*. Mishawaka: Mc Cutchan Pub Corp.

Retno Wulandari. (2005). *Penilaian Kebutuhan Pelatihan: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Siasat Bisnis. Edisi Khusus JSB On Human Resources.

Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suhendra, K. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: STKS Press.

Winkel S. (1991). *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: PT Grasindo.